

PERBANASNews

No. 158 Tahun 2026 | Januari - Maret 2026

Kinerja Perbankan 2025

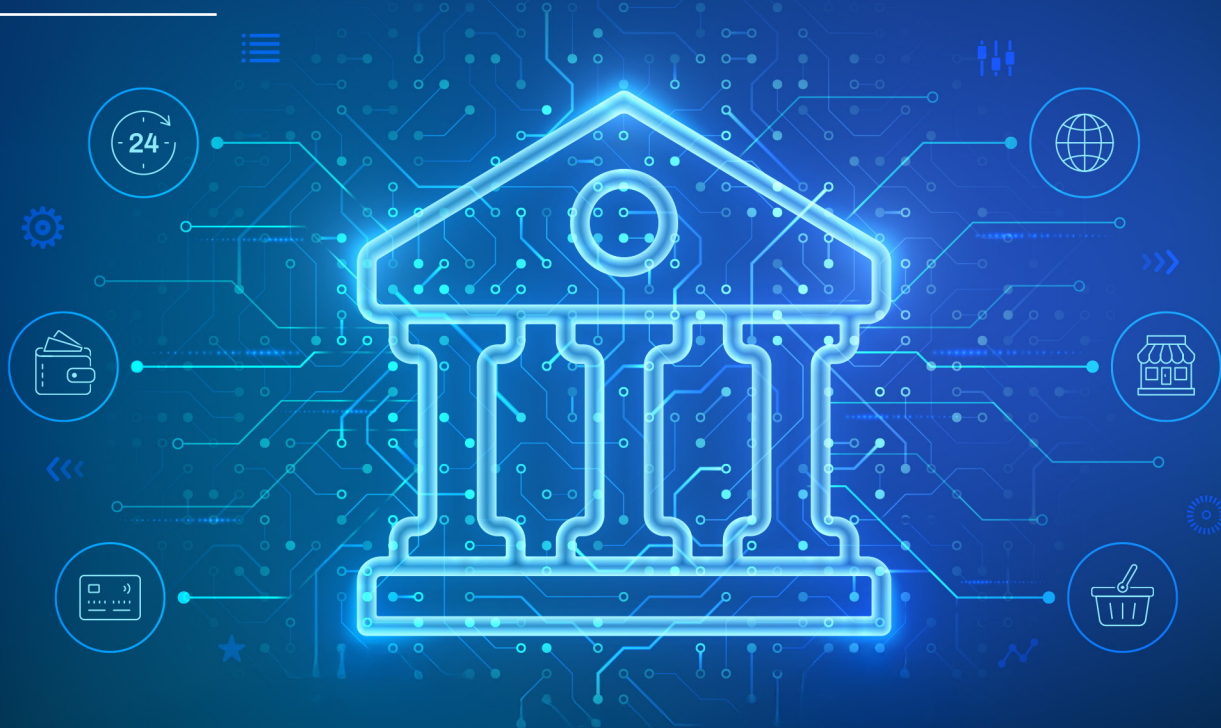
Resiliensi Perbankan Nasional:
**Ada Optimisme di Tengah
Badai Geopolitik**

**Laba Tumbuh Impresif,
Fundamental Kian Kokoh**

**Budaya Baru di Tengah
Badai Global**

Menavigasi Era Baru:
**Perbankan sebagai
Jangkar Efisiensi dan
Transformasi Nasional**

**Perbankan Kunci
Integrasi Ekonomi di
ASEAN**



PERBANAS UTAMA

6 **Resiliensi Perbankan Nasional: Ada Optimisme di Tengah Badai Geopolitik**

Industri perbankan nasional baru saja melewati 2025 penuh dengan dinamika yang paradoks. Di satu sisi, kita menyaksikan percepatan transformasi digital dan integrasi data perbankan yang semakin matang.

9 **Budaya Baru di Tengah Badai Global**

Lanskap ekonomi global yang kian dinamis memaksa Indonesia untuk tidak sekadar diam dan menunggu badai reda. Ketika harga minyak mentah dunia melambung hingga menembus angka USD 112 per barel akibat ketegangan di Timur Tengah, sebuah respons kebijakan yang berani lahir dari rahim pemerintahan. Alih-alih hanya bersikap reaktif seperti banyak negara lain yang langsung mendeklarasikan darurat energi, Indonesia justru memperkenalkan "Gerakan Transformasi Kebiasaan Hidup Baru" atau yang dikenal sebagai kebijakan 8 Transformasi Budaya Kerja Nasional. Ini adalah sebuah manuver defensif-strategis yang dirancang untuk menjaga napas APBN tetap segar di tengah gempuran ketidakpastian global.

ARTIKEL PERBANAS

Perbankan Kunci Integrasi Ekonomi di ASEAN **12**

Menavigasi Era Baru: Perbankan sebagai Jangkar Efisiensi dan Transformasi Nasional **14**

Kinerja Bank Digital 2025: Laba Tumbuh Impresif, Fundamental Kian Kokoh **17**

KEGIATAN

Sosialisasi Aksi Korporasi Perbankan: KUHP/KUHAP Baru dan UU Penyesuaian Pidana **21**

Berbagi Berkah di bulan Ramadhan 2026 **22**

Sosialisasi "PMK No. 108 Tahun 2025 dan Klinik Tindak Lanjut Coretax **24**

CFO FORUM PERBANAS: Driving Acceleration with Accountability **25**

SUPLEMEN

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT. Bank Hibank Indonesia **10**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) **16**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) **19**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Bank Syariah Nasional **20**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Bank ANZ Indonesia **24**



PERBANASNews

No. 158 Tahun 2026
Januari - Maret 2026

PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(PERBANAS)

PELINDUNG

Badan Pengurus PERBANAS

REDAKSI

Anika Faisal
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza
Andry Asmoro
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna
• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

- 1 halaman: Rp4.000.000,00
- ½ halaman: Rp2.250.000,00

PERBANASNews menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya PERBANAS Lantai 1
Jalan PERBANAS, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339
website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS

MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993

Catatan Redaksi

Di tengah dinamika global yang kian kompleks, industri perbankan nasional kembali menunjukkan daya tahannya sebagai salah satu pilar utama stabilitas ekonomi. Edisi kali ini menyoroti bagaimana kinerja perbankan sepanjang 2025 tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga mampu beradaptasi menghadapi tekanan eksternal yang semakin berlapis.

Menguatnya konflik di berbagai kawasan, tren proteksionisme, hingga polarisasi perdagangan global telah menciptakan lanskap geoekonomi yang penuh ketidakpastian. Namun demikian, perbankan Indonesia berhasil menjaga fungsi intermediasi, kualitas aset yang relatif terkendali, serta permodalan yang kuat. Ini menjadi bukti bahwa fondasi industri perbankan nasional semakin kokoh dan adaptif terhadap guncangan global.

Resiliensi tersebut tidak hadir begitu saja. Transformasi digital yang terus dipercepat, penguatan manajemen risiko, serta kehati-hatian dalam ekspansi kredit menjadi kunci utama. Di sisi lain, sinergi yang erat antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan turut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perbankan juga semakin aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, yang menjadi motor pertumbuhan baru di tengah perlambatan global. Tantangan ke depan tentu tidak ringan, tetapi pengalaman menghadapi krisis dan ketidakpastian memberikan modal berharga bagi industri ini untuk terus melangkah.

Sorotan berikutnya dalam edisi ini adalah respons perbankan terhadap paket kebijakan pemerintah yang diumumkan pada 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya gerakan budaya kerja baru, mulai dari efisiensi konsumsi BBM, penghematan anggaran, hingga penerapan *work from home* (WfH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Bagi industri perbankan, kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi operasional sekaligus mendorong transformasi budaya



kerja yang lebih fleksibel dan produktif. Sejumlah bank telah lebih dahulu mengadopsi pola kerja *hybrid*, didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Karena itu, kebijakan WfH bukanlah hal baru, melainkan peluang untuk semakin mengoptimalkan produktivitas karyawan tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Di sisi lain, efisiensi energi dan pengelolaan biaya operasional juga menjadi perhatian penting, sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang kini semakin mengemuka. Perbankan dituntut tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Di tingkat regional, perhatian juga tertuju pada peran Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) bersama perbankan ASEAN melalui ASEAN Bankers Association (ABA) dalam terus aktif berkontribusi mendorong agenda integrasi ekonomi kawasan. Integrasi ini menjadi semakin relevan di tengah

fragmentasi global yang cenderung meningkat. ASEAN memiliki potensi besar sebagai kawasan yang dinamis, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan pasar yang luas.

PERBANAS, sebagai representasi industri perbankan nasional, terus aktif berkontribusi dalam berbagai forum regional untuk memperkuat kolaborasi antarbank di kawasan. Fokusnya tidak hanya pada harmonisasi regulasi dan sistem pembayaran, tetapi juga pada pengembangan inovasi keuangan digital, pembiayaan berkelanjutan, serta mencegah kejahatan keuangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing perbankan ASEAN di tingkat global sekaligus menciptakan sistem keuangan kawasan yang lebih terintegrasi dan inklusif.

Ke depan, tantangan integrasi tentu tidak sederhana. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, kerangka regulasi, hingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang perlu dijembatani.

Namun, dengan komitmen bersama dan semangat kolaborasi, integrasi perbankan ASEAN bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Melalui berbagai sorotan tersebut, edisi ini mengajak pembaca melihat bahwa industri perbankan tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga bertransformasi dan berkontribusi lebih luas. Di tengah perubahan yang cepat, kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi menjadi kunci utama untuk terus relevan. Perbankan Indonesia telah menunjukkan langkah yang tepat, dan perjalanan ke depan akan semakin menentukan peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun kawasan. (**)



Resiliensi Perbankan Nasional: Ada Optimisme di Tengah Badai Geopolitik

Industri perbankan nasional baru saja melewati 2025 penuh dengan dinamika yang paradoks. Di satu sisi, kita menyaksikan percepatan transformasi digital dan integrasi data perbankan yang semakin matang.

Namun di sisi lain, kita dipaksa beradaptasi dengan kondisi ekonomi global yang tidak ramah—era suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama (*higher for longer*), volatilitas nilai tukar yang tajam, hingga pergeseran arus modal dunia.

Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia masih terbilang tangguh dengan pertumbuhan di kisaran 5,11%, tertinggi sejak 2023 seperti yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), bulan lalu. Namun tekanan inflasi pangan dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah serta Eropa Timur menjadi awan mendung yang menyelimuti kebijakan moneter kita.

Dalam pusaran arus tersebut, perbankan nasional bukan sekadar bertahan,

melainkan mampu mencatatkan rapor kinerja yang sangat solid. "Hal itu membuktikan bahwa pengalaman melewati krisis pandemi beberapa tahun silam membuat institusi keuangan nasional jauh lebih resilien," kata Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi.

Indikator Fundamental Perbankan

Melihat capaian 2025, kesehatan perbankan berada pada level sangat aman (*resilient*). Hal tersebut tercermin dari indikator permodalan industri perbankan. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) industri perbankan nasional per Desember 2025 tercatat berada di level 25,89%. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan bantalan (*buffer*) yang sangat tebal untuk memitigasi potensi risiko kredit dan operasional pada masa depan.

Dari sisi kualitas aset terus menunjukkan tren positif. Kekhawatiran akan terjadi

'ledakan' kredit bermasalah pasca-berakhirnya kebijakan restrukturisasi saat pandemi tidak terbukti. Rasio kredit bermasalah (*nonperforming loan/NPL*) gross berhasil ditekan ke level 2,05% dengan NPL Net di angka 0,79%.

Bahkan, indikator *Loan at Risk* (LAR) terus melandai ke level 8,77%, menyusut signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan LAR ini merupakan sinyal bahwa manajemen risiko perbankan semakin presisi dalam melakukan kurasi debitur dan pembentukan cadangan kerugian yang memadai.

Fungsi intermediasi, yang merupakan marwah dari industri perbankan, masih berjalan sesuai dengan jalur. Realisasi pertumbuhan kredit sepanjang 2025 mencapai 9,69% (*year-on-year/yoy*). Angka ini hampir menyentuh batas atas target double digit yang ditetapkan regulator. Tren positif di tengah tekanan ekonomi makro baik dari domestik dan dunia.

Pertumbuhan kredit terutama digerakkan oleh sektor produktif, seperti Kredit Modal Kerja (KMK) dan investasi di sektor industri pengolahan serta pertambangan—yang merupakan jantung dari program hilirisasi nasional.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh stabil sebesar 10,4%, didominasi oleh dana murah (CASA). "Keberhasilan perbankan dalam memupuk CASA ini tidak lepas dari adopsi digital banking yang masif, yang membuat nasabah ritel semakin nyaman menempatkan likuiditasnya pada sistem perbankan nasional," kata Sekjen PERBANAS Anika Faisal.

Dari aspek profitabilitas, efisiensi yang didorong oleh digitalisasi mulai membuahkan hasil dalam perolehan laba bersih. Rasio margin bunga bersih (*net interest margin/NIM*) terjaga stabil 4,56%, yang didukung oleh kemampuan bank mengelola efisiensi operasional.

Rasio *Return on Assets* (ROA) & *Return on Equity* (ROE) menunjukkan tren positif dibandingkan dengan bank kawasan regional. Perbankan nasional mencatatkan rata-rata ROA di level 2,53% dan ROE di kisaran 14,5% - 15,2%.

Angka ini menunjukkan kemampuan bank yang sangat efektif dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan laba, meskipun beban bunga (*cost of fund*) cenderung meningkat. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat di level 73%-75%. Hal ini merupakan hasil nyata dari investasi teknologi jangka panjang yang mulai membuah hasil dalam menekan biaya *brick-and-mortar* melalui digitalisasi layanan

Peluang dan Tantangan Geopolitik

Memasuki 2026, industri perbankan berada pada persimpangan jalan yang menantang. Prospek ekonomi domestik tetap menjanjikan, terutama didorong oleh keberlanjutan proyek strategis nasional, hilirisasi industri, serta program prioritas pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah.

“Sektor-sektor ini (proyek strategis) akan tetap menjadi mesin utama pertumbuhan kredit perbankan. Tapi, kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko sistemik yang sedang mengintai di cakrawala global,” kata Hery Gunardy.

Tantangan terbesar tahun ini berasal dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Konflik antara AS-Israel melawan Iran bukan lagi sekadar isu politik, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas energi dunia. Penutupan Selat Hormuz, jika dilakukan secara terus-menerus, akan memicu lonjakan harga minyak mentah yang masif.

Bagi Indonesia, sebagai negara net-importir minyak, kondisi ini akan memberikan tekanan ganda: pada nilai tukar rupiah dan pada stabilitas fiskal.

Defisit fiskal yang membengkak akibat beban subsidi energi—yang dalam APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp356,8 triliun—berpotensi memicu pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran.

“Salah satu risiko yang perlu kita antisipasi adalah penarikan simpanan pemerintah di sistem perbankan untuk menutupi kebutuhan belanja subsidi tersebut. Jika ini terjadi secara mendadak dan masif, perbankan akan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat secara sektoral,” kata Ekonom Perbanas Aviliani.

Melihat peta tantangan 2026, industri perbankan perlu meningkatkan level kewaspadaan pada beberapa poin krusial:

Pertama, risiko transmisi suku bunga. Dengan inflasi impor yang berpotensi naik akibat harga energi, Bank Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi (*BI-Rate*) dalam waktu yang lebih lama. Kondisi ini akan membuat biaya dana (*cost of fund*) tetap mahal. Bank harus sangat cerdas dalam mengelola struktur dana mereka agar margin tidak tergerus, tetapi tetap kompetitif dalam menyalurkan kredit.

Kedua, kualitas aset di sektor sensitif. Kenaikan biaya logistik dan harga energi akan langsung memukul margin keuntungan perusahaan di sektor manufaktur, transportasi, dan UMKM. Perbankan perlu melakukan stress test secara berkala terhadap portofolio kredit di sektor-sektor ini. Jangan sampai lonjakan biaya produksi di sisi debitur berubah menjadi NPL di sisi perbankan.

Ketiga, kepastian investasi proyek strategis. Naiknya biaya modal (*cost of capital*) membuat beberapa investor *wait and see* terhadap proyek-proyek hilirisasi maupun infrastruktur. Perbankan dituntut untuk lebih inovatif dalam skema pembiayaan, misalnya melalui sindikasi atau kolaborasi dengan institusi keuangan internasional, untuk memastikan proyek-

proyek yang menjadi penyangga ekonomi nasional tidak terhenti di tengah jalan.

Keempat, keamanan siber dan kepercayaan nasabah. Di tengah volatilitas pasar, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Gangguan pada sistem pembayaran digital atau kebocoran data dapat memicu kepanikan pasar (*market panic*). Perbankan secara terus-menerus berinvestasi pada ketahanan siber sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko operasional.

Optimisme yang Terukur

Industri perbankan nasional telah membuktikan kemampuannya untuk tetap tumbuh di tengah badai. Namun, resiliensi bukanlah sesuatu yang statis. Ia harus terus dirawat dengan kebijakan yang pruden, inovasi yang tiada henti, dan koordinasi yang erat antara pelaku industri dengan regulator—OJK dan Bank Indonesia—serta pemerintah.

Tahun 2026 bukan tentang siapa yang paling cepat melakukan ekspansi, melainkan siapa yang paling presisi dalam membaca risiko dan paling sigap dalam merespons dinamika global.

“PERBANAS berkomitmen untuk terus menjadi jembatan bagi industri perbankan agar tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah tantangan seberat apa pun. Optimisme itu muncul dari modal yang kuat dan likuiditas yang terjaga, perbankan Indonesia akan mampu melewati ujian geopolitik dan fiskal tahun ini dengan kepala tegak,” tambah Hery.

Bankir harus melangkah dengan optimisme yang terukur, menjaga kepercayaan nasabah, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan menjadi motor penggerak kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (*)

Pendaftaran Mahasiswa Baru

PROGRAM EKSTENSI

Periode Maret 2026

Fakultas Ekonomi & Bisnis

S1 Akuntansi
S1 Manajemen
S1 Ekonomi Syariah

Fakultas Teknologi Informasi

S1 Teknik Informatika
S1 Sistem Informasi

Info lebih lanjut:

- +62 851 7985 3802
(Kampus Jakarta)
- +62 851 7985 3805
(Kampus Bekasi)

PENDAFTARAN:



admisi.perbanas.id



Budaya Baru di Tengah Badai Global

Lanskap ekonomi global yang kian dinamis memaksa Indonesia untuk tidak sekadar diam dan menunggu badai reda. Ketika harga minyak mentah dunia melambung hingga menembus angka USD 112 per barel akibat ketegangan di Timur Tengah, sebuah respons kebijakan yang berani lahir dari rahim pemerintahan. Alih-alih hanya bersikap reaktif seperti banyak negara lain yang langsung mendeklarasikan darurat energi, Indonesia justru memperkenalkan “Gerakan Transformasi Kebiasaan Hidup Baru” atau yang dikenal sebagai kebijakan 8 Transformasi Budaya Kerja Nasional. Ini adalah sebuah manuver defensif-strategis yang dirancang untuk menjaga napas APBN tetap segar di tengah gempuran ketidakpastian global.

Kebijakan yang mulai efektif per 1 April 2026 ini bukan sekadar paket aturan birokrasi, melainkan sebuah orkestrasi besar yang melibatkan banyak pemangku

kepentingan. Jika kita menguraikan kebijakan ini secara menyeluruh, tampak jelas sebuah upaya sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat dan birokrasi agar lebih efisien. Pemerintah, di bawah komando Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama jajaran kementerian seperti MenPAN-RB dan Kementerian Ketenagakerjaan, merumuskan langkah ini sebagai jalan evolusioner menuju kemandirian energi nasional.

Berikut rincian kebijakan 8 Transformasi Budaya Kerja Nasional.

1. Transformasi Sektor Pemerintah

(WFH ASN): Instansi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menerapkan skema *WorkFrom Home* (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan dan mengurangi mobilitas harian pegawai negeri.

2. Transformasi Sektor Swasta:

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan imbauan bagi sektor swasta untuk turut menerapkan WFH minimal satu hari dalam sepekan. Meski bersifat imbauan, sektor swasta diharapkan menyesuaikan kebijakan ini dengan karakteristik industrinya masing-masing demi efisiensi energi kolektif.

3. Pengecualian Sektor Strategis:

Penerapan WFH tidak berlaku bagi sektor esensial dan layanan publik yang menuntut kehadiran fisik, seperti kesehatan, keamanan, energi, logistik, industri produksi, dan keuangan. Hal ini untuk memastikan roda ekonomi dan pelayanan dasar tetap berjalan optimal.

4. Pemangkasan Perjalanan Dinas:

Pemerintah melakukan efisiensi belanja negara secara drastis

dengan memangkas kuota perjalanan dinas hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri.

5. **Pembatasan Kendaraan Dinas:**

Penggunaan kendaraan operasional dinas dibatasi maksimal 50%.

Pejabat dan staf didorong untuk beralih ke transportasi publik atau menggunakan kendaraan listrik (EV) yang lebih ramah lingkungan.

6. **Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG):**

Program andalan MBG diatur untuk beroperasi selama lima hari dalam sepekan di sebagian besar wilayah. Pengecualian diberikan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), wilayah dengan tingkat stunting

tinggi, dan sekolah asrama yang tetap dilayani penuh.

7. **Mandatori Biodiesel B50:** Sebagai bagian dari kemandirian energi, pemerintah mempercepat penerapan kebijakan B50 yang dijadwalkan mulai berlaku penuh pada 1 Juli 2026. Langkah ini diproyeksikan dapat mengurangi ketergantungan pada BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

8. **Gerakan Hemat Energi Masyarakat:**

Masyarakat luas diimbau untuk menjalankan gaya hidup hemat energi, seperti penggunaan listrik yang bijak di rumah dan kantor, serta memprioritaskan "mobilitas cerdas" melalui penggunaan transportasi umum.

Urgensi dari transformasi ini berakar pada kenyataan pahit di pasar energi global. Dengan setiap kenaikan satu dolar pada harga minyak brent, beban subsidi nasional bisa membengkak hingga Rp6,8 triliun. Mengingat beban subsidi bisa mencapai angka Rp150 triliun hingga Rp210 triliun, pemerintah menyadari bahwa keuntungan dari komoditas lain (*windfall*) tidak akan pernah cukup untuk menambal lubang tersebut. Itulah alasan mengapa efisiensi menjadi kata kunci utama. Target yang dipasang pun tidak main-main: penghematan konsumsi BBM hingga 20% demi memastikan defisit APBN tetap terkendali di bawah angka aman 3% PDB.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa masyarakat



Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Bank Hibank Indonesia

Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Hibank Indonesia mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut :

Tahun 2025 Rp 31.288.251.200,00

(Tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2025 sebagai lampiran.



Perbankan Kunci Integrasi Ekonomi di ASEAN

Kolaborasi lintas negara kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang tak terelakkan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Polarisasi perdagangan, menguatnya proteksionisme, serta ketegangan geopolitik telah mendorong banyak kawasan untuk memperkuat kerja sama internalnya. Dalam konteks ini, ASEAN tampil sebagai salah satu kawasan yang terus berupaya menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui integrasi yang lebih erat.

Di tengah upaya tersebut, sektor perbankan memainkan peran yang semakin strategis. Perbankan tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi yang memastikan

arus pembiayaan, investasi, dan perdagangan lintas negara tetap berjalan efisien. Dengan peran ini, perbankan kian menegaskan posisinya sebagai motor utama dalam mendorong akselerasi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan Chairman ASEAN Bankers Association (ABA) Tan Teck Long, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.

Pertemuan tersebut juga dihadiri pengurus Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), di antaranya Sekjen PERBANAS Anika Faisal, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Komunikasi PERBANAS Ahmad Solichin Lutfiyanto, Anggota Bidang

Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Fransisca Nelwan Mok, serta Direktur Eksekutif PERBANAS Eka Sri Dana Afriza.

Dengan populasi sekitar 680 juta jiwa, ASEAN bukan sekadar kawasan regional biasa, melainkan salah satu pasar terbesar dan paling dinamis di dunia. Nilai perdagangan intra-ASEAN yang sudah menembus lebih dari US\$ 800 miliar per tahun menunjukkan bahwa konektivitas ekonomi antarnegara anggota semakin kuat.

Di sisi lain, sektor perbankan ASEAN juga terus berkembang. Saat ini terdapat lebih dari 1.500 bank, dengan total aset melampaui US\$ 4 triliun. Ini menjadi modal besar untuk mendorong pembiayaan pembangunan dan investasi. Dalam pertemuan tersebut, Kao Kim Hourn memberikan apresiasi kepada ABA atas kontribusinya dalam mendukung visi ASEAN *Community* 2025. Sejak diadopsi pada 2015, ASEAN *Community* bertujuan

menjadikan kawasan ini lebih terintegrasi dan inklusif, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam hal ini, perbankan berperan sebagai “urat nadi” yang memastikan arus pembiayaan tetap lancar dan inklusif.

Salah satu sorotan utama adalah percepatan ekonomi digital melalui ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). Kerangka ini ditargetkan rampung pada April 2026 dan akan ditandatangani para pemimpin ASEAN pada November mendatang.

Ekonomi digital ASEAN sendiri diproyeksikan mencapai nilai lebih dari US\$ 300 miliar pada 2025, dan bisa menembus US\$ 600 miliar pada 2030. Ini peluang besar, tetapi juga tantangan. “Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Sekjen ASEAN kira-kira pesan yang ingin ditekankan.

Namun, pesatnya digitalisasi juga membawa risiko. Kao Kim Hourn mengingatkan pentingnya penguatan sistem *anti-fraud* dan *anti-scam*. Menurutnya, tanpa sistem keamanan yang kuat, kepercayaan investor bisa runtuh. “ASEAN tidak boleh menjadi surga bagi penipuan digital,” ujarnya.

Karena itu, kolaborasi antarnegara dan antarbank dalam memerangi kejahatan keuangan menjadi semakin mendesak.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen ASEAN juga meminta ABA lebih optimal memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) yang telah disepakati dengan mitra global.

Perbankan, menurut Kao, memiliki peran penting, terutama dalam mendukung pembiayaan perdagangan dan membantu pelaku

usaha, termasuk UMKM, menembus pasar internasional.

Dia menambahkan, di tengah krisis energi global, kerja sama kawasan juga diperkuat melalui ASEAN *Petroleum Security Agreement*. Perjanjian ini menjadi dasar untuk menjaga stabilitas pasokan energi di kawasan.

Sektor perbankan kembali memainkan peran penting, terutama dalam membiayai proyek-proyek energi, termasuk energi terbarukan yang kini semakin menjadi fokus.

Tren Investasi ke Kawasan

Sementara itu, Chairman ABA Tan Teck Long mengungkapkan, tren investasi global kini mulai bergeser. Investor tidak lagi melihat negara secara individu, melainkan kawasan sebagai satu kesatuan.

Tren ini menjadi peluang besar bagi ASEAN untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi kolektif. Namun, syaratnya adalah integrasi yang lebih dalam dan koordinasi yang lebih kuat. ABA, kata dia, akan terus mendukung kolaborasi regional, termasuk dalam memperkuat konektivitas perbankan dan pembiayaan lintas negara.

Potensi ASEAN sebagai destinasi investasi kawasan tak lepas dari populasi yang besar, mencapai 680 juta jiwa, atau hampir 10% dari populasi dunia. Selain itu, juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Melalui visi menjadi kawasan integrasi ekonomi, ASEAN memiliki peluang besar menjadi *single investment destination*. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan adanya harmonisasi regulasi dan terutama integrasi sistem keuangan. “Dan ABA akan mendukung berbagai inisiatif

ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi,” ujar Tan.

Peran Indonesia

Kehadiran PERBANAS dalam pertemuan ini juga mencerminkan peran aktif Indonesia dalam mendorong penguatan sektor perbankan ASEAN. Menurut Sekjen PERBANAS Anika Faisal, sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam implementasi berbagai inisiatif regional, termasuk dalam bidang digitalisasi keuangan dan penguatan sistem keamanan finansial.

“PERBANAS yang juga ada di dalam ABA, selama ini aktif memegang berbagai komite di ABA,” ujarnya.

Anika juga menekankan pentingnya mendorong digitalisasi sektor keuangan di kawasan, serta menjadikan ASEAN sebagai kawasan bebas kejahatan keuangan. “Kita sedang menyelesaikan soal digital payment, standardisasi penanganan scamming. Ke depan kita juga akan bicara soal *sustainability* dan AI (*artificial intelligent*),” ungkapnya.

Anika juga menegaskan, dalam konteks ABA, PERBANAS tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional, khususnya sektor perbankan. “PERBANAS akan terus mengedepankan kepentingan ekonomi Indonesia, khususnya sektor perbankan nasional, dalam setiap kiprah dan kontribusinya di ABA. Dalam dinamika kerja sama regional, kami memastikan bahwa posisi dan daya saing perbankan Indonesia tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya memperkuat integrasi ekonomi ASEAN,” tegasnya. (*)

Menavigasi Era Baru: Perbankan sebagai Jangkar Efisiensi dan Transformasi Nasional

Ketua Umum PERBANAS Hery Gunardi menegaskan bahwa industri perbankan akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika global dan memperkuat ketahanan nasional. Transformasi kebiasaan hidup baru yang mendorong efisiensi energi dan digitalisasi bukan sekadar respons jangka pendek terhadap tekanan eksternal, tetapi merupakan momentum penting untuk mempercepat peran perbankan sebagai akselerator ekonomi digital dan hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut menjadi semakin relevan di tengah situasi global yang berada di persimpangan jalan. Lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus USD 112 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz telah memaksa banyak negara mengambil langkah darurat. Namun Indonesia memilih jalan yang berbeda melalui kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan penguatan ketahanan ekonomi jangka menengah.

Bagi sektor perbankan, kebijakan yang mulai efektif per 1 April 2026 ini bukan merupakan hambatan, melainkan momentum pembuktian

resiliensi yang telah terbentuk kuat selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Bidang Pengkajian dan Riset PERBANAS, Aviliani, menegaskan bahwa kebijakan *Work from Home* (WFH) sebagai salah satu pilar transformasi budaya kerja bukan merupakan tantangan baru bagi sektor perbankan. Industri perbankan telah melewati ujian yang jauh lebih berat pada masa pandemi COVID-19 dan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara stabil.

Data historis menunjukkan bahwa meskipun sempat menerapkan pembatasan mobilitas hingga 100% WFH, indikator kesehatan industri tetap terjaga. *Net Interest Margin* (NIM) berada di level 4,45% dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,06%, masih berada dalam batas aman yang ditetapkan regulator.

Memasuki masa transformasi 2026 ini, kekuatan perbankan nasional justru semakin solid dengan fondasi yang kokoh. Indikator permodalan tercatat sangat kuat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri yang berada di kisaran 26% - 27%, jauh di atas ambang batas internasional. Kondisi likuiditas juga sangat memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD)

yang terjaga di level 110% - 120% dan rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di atas 25%.

Dari sisi ekspansi, pertumbuhan kredit menunjukkan tren positif yang stabil di angka 10% - 12% (yoy), membuktikan bahwa perbankan tetap produktif meski operasional internal menjadi lebih efisien

Pengalaman dan data performa tersebut memperkuat keyakinan bahwa adopsi teknologi serta penguatan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) menjadikan perbankan sebagai sektor yang paling siap mendukung agenda efisiensi energi nasional melalui pola kerja yang lebih fleksibel dan adaptif.

Penerapan Transformasi Budaya Kerja Nasional juga membuka ruang efisiensi operasional yang signifikan bagi industri. Pengurangan mobilitas perjalanan dinas, optimalisasi penggunaan energi gedung perkantoran, serta peningkatan pemanfaatan kanal layanan digital berkontribusi langsung terhadap perbaikan struktur biaya industri perbankan.

Namun demikian, perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat menuju efisiensi energi berpotensi memberikan tekanan pada beberapa segmen debitur, khususnya sektor transportasi konvensional serta pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas kawasan perkantoran. Oleh karena itu, penguatan *early warning system* menjadi langkah penting agar potensi risiko kredit dapat diantisipasi sejak dini dan tidak berkembang menjadi risiko sistemik.

Di sisi lain, transformasi pola hidup baru justru membuka peluang besar bagi akselerasi model bisnis masa depan perbankan. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi

digital mendorong peningkatan penggunaan layanan mobile banking serta ekosistem pembayaran elektronik. Momentum ini menjadi ruang strategis bagi peningkatan *fee-based income* sekaligus perluasan akses layanan keuangan secara lebih efisien melalui pendekatan *branchless banking*.

Transformasi energi nasional juga menciptakan ceruk pembiayaan baru yang sangat potensial. Program konversi kendaraan berbasis BBM menuju kendaraan listrik serta dorongan penerapan teknologi hemat energi di sektor industri dan bangunan komersial memperkuat peran pembiayaan berkelanjutan sebagai salah satu motor pertumbuhan baru industri perbankan.

Sejalan dengan arah tersebut, industri perbankan nasional memandang pembiayaan hijau tidak lagi sebagai inisiatif tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan jangka panjang yang selaras dengan agenda ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Aviliani juga mengingatkan bahwa kewaspadaan terhadap dinamika global tetap menjadi perhatian utama industri perbankan. Menurutnya, kenaikan setiap USD 1 pada harga minyak Brent diperkirakan meningkatkan tekanan subsidi energi hingga sekitar Rp6,8 triliun. Dengan total kebutuhan subsidi yang berpotensi mencapai Rp150 hingga Rp210 triliun, komunikasi kebijakan yang transparan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekspektasi investor dan pelaku pasar.

Dalam konteks tersebut, industri perbankan juga terus memperkuat kapasitas manajemen risiko melalui pendekatan yang lebih adaptif



terhadap risiko energi dan perubahan iklim, termasuk melalui penerapan *Climate Risk Stress Testing (CRST)* secara berkala guna memastikan ketahanan portofolio pembiayaan dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.

Menghadapi dinamika transformasi ini, PERBANAS memandang terdapat tiga fokus strategi utama yang perlu terus diperkuat oleh industri perbankan. Pertama, akselerasi digitalisasi untuk meningkatkan fleksibilitas layanan dan efisiensi operasional. Kedua, penguatan manajemen risiko yang semakin responsif terhadap dinamika energi dan ketidakpastian global.

Ketiga, pengembangan inovasi produk melalui *supply chain financing* dan pembiayaan berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Dengan sinergi yang kuat antara arah kebijakan pemerintah dan kesiapan industri, perbankan nasional tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai *shock absorber* perekonomian nasional yang mampu mengubah tantangan krisis energi menjadi momentum transformasi menuju ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT (BANK NTB SYARIAH)

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TAHUN 2025 : Rp 23.096.949.814

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat Bersama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025

Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Nasabah Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih :

1. Publikasi ini merupakan kewajiban hukum, bukan merupakan informasi terkait adanya indikasi kinerja keuangan Bank yang menurun
2. Data mengenai Nasabah dilindungi dan hanya digunakan untuk kepatuhan pajak
3. Apabila terdapat keberatan atas publikasi Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih dapat mengajukan keberatan selama 30 hari sejak pengumuman ini di publikasikan
4. Penyelesaian sengketa atas publikasi Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih di utamakan melalui jalur musyawarah atau mediasi
5. Terhadap Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih (Hapus Buku) tahun 2025 tidak mengakibatkan penghapusan hak tagih

WWW.BANKNTBSYARIAH.CO.ID

Bank NTB Syariah Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta Merupakan Peserta Penjaminan LPS





Kinerja Bank Digital 2025: **Laba Tumbuh Impresif, Fundamental Kian Kokoh**

JAKARTA – Kelompok bank digital menorehkan catatan positif meskipun situasi ekonomi lokal dan global penuh dengan tantangan pada 2025. Fungsi intermediasi tumbuh di atas rata-rata industri perbankan nasional sehingga mendorong pundi-pundi margin melesat.

Berdasarkan laporan keuangan 11 bank digital, kelompok ini sanggup membuktikan bahwa model bisnis berbasis teknologi mampu melakukan penetrasi kredit secara optimal meskipun dengan jaringan kantor fisik yang minim.

Sepanjang 2025, mayoritas bank digital berhasil memanen laba bersih yang ditopang oleh agresivitas penyaluran kredit dengan tingkat efisiensi yang kian membaik.

Pertumbuhan aset bank digital pada 2025 tercatat sangat masif, melampaui rata-rata industri perbankan konvensional. PT Bank Seabank Indonesia, anak usaha Sea Group, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan total aset mencapai Rp44,43 triliun.

Kemudian, disusul oleh PT Bank Jago Tbk. dengan aset Rp36,5 triliun. Pertumbuhan aset paling fenomenal dicatatkan oleh PT Super Bank Indonesia Tbk. yang melesat 86,77% menjadi Rp21,28 triliun, menjadikannya bank digital dengan pertumbuhan aset tertinggi tahun lalu.

Lonjakan aset bank digital ini didorong oleh mesin penyaluran kredit yang menderu kencang. Rata-rata pertumbuhan kredit bank digital mencapai 31,53% (*year on year/yoy*), jauh di atas perbankan nasional yang hanya tumbuh 9,69% (*yoy*).

Strategi integrasi dengan ekosistem digital seperti *e-commerce*, *ride-hailing*, dan *P2P lending* menjadi motor utama pertumbuhan. Ambil contoh, Seabank sebagai peringkat teratas penyalur kredit bersinergi dengan Shopee, membukukan portofolio Rp32,13 triliun.

Bank Jago berada yang berada di posisi kedua mencatatkan *outstanding* kredit Rp24,34 triliun

lewat ekosistem GoTo dan Bibit. Kemudian Krom Bank mencatat pertumbuhan kredit tahunan tertinggi sebesar 103,27%. (tabel)

Kenaikan aset bank digital turut ditopang kenaikan dana pihak ketiga (DPK) dengan kenaikan 69,67% (*yoy*), kontras dengan pertumbuhan industri perbankan di level 10,4% (*yoy*). Fitur aplikasi yang *user-friendly* dan suku bunga kompetitif menjadi magnet bagi nasabah.

Panen Laba Bank Digital

Pada 2025 menjadi tahun keberuntungan bagi profitabilitas bank digital. Sebanyak 9 dari 11 bank mampu mencetak laba bersih dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 226%. Seabank menjadi yang paling cuan dengan laba bersih Rp678,4 miliar (*yoy*).

Bank Neo Commerce (BNC) mencatatkan lonjakan laba fantastis sebesar 2.744% (*yoy*) menjadi Rp565,5 miliar berkat strategi *de-risking* dan efisiensi cadangan kerugian.

Super Bank dan Bank Aladin berhasil melakukan turnaround dramatis dari posisi rugi besar pada 2024 menjadi laba pada 2025, masing-masing tercatat laba Rp99,6 miliar dan Rp150,7 miliar

Keberhasilan bank digital dalam menorehkan laba tak terlepas dari kualitas aset dan efisiensi dalam menjalankan roda bisnis. Dengan sistem digital, kelompok bank ini beroperasi pada segmen *high-yield*.

Sebut saja Bank Amar yang mempertahankan rasio *net interest margin* tertinggi di level 23,2%, diikuti Seabank (21,5%) dan Krom Bank

(20,4%). Dari sisi model bisnis digital terbukti sangat efisien yang dilihat dari rasio *cost income ratio* (CIR).

Lagi-lagi Krom Bank tampil sebagai bank paling efisien dengan CIR hanya 16,15%, sementara Seabank di angka 22,3%.

Dari sisi kualitas aset (*non performing loan/NPL*), meski bermain di risiko tinggi, mayoritas bank menjaga risiko dengan ketat. Bank Jago mencatatkan NPL *Gross* terendah di industri, yakni hanya 0,6%.

Seabank, meski memiliki beban *impairment* (cadangan) jumbo sebesar Rp6,03 triliun, berhasil

menjaga NPL Net di angka sangat rendah 0,13%.

Adapun rasio penyaluran kredit terhadap dana (LDR) menunjukkan fungsi intermediasi yang aktif. Sebanyak 7 dari 11 bank memiliki LDR di atas 80%, teratas adalah Seabank dengan rasio 92,3% dan Bank Jago 94%.

Secara keseluruhan, kinerja 2025 menegaskan bahwa bank digital bukan lagi sekadar tren, melainkan entitas perbankan yang solid secara fundamental dengan skalabilitas yang sulit ditandingi oleh model perbankan tradisional.

Bank	Asset	YoY	CAGR*
Seabank	44,438,831	28,48%	16,27%
Jago	36,507,347	27,90%	29,10%
SuperBank	21,282,312	86,77%	74,64%
BNC	18,973,769	8,99%	-1,23%
BCA Digital	18,923,847	17,87%	19,62%
Allo Bank	18,470,073	32,08%	18,65%
Bank Saqu	15,380,418	17,33%	11,66%
Aladin	14,422,179	54,05%	44,97%
Raya	13,087,109	-0,32%	-1,99%
Krom Bank	12,214,396	83,64%	54,47%
Amar Bank	6,763,529	38,95%	14,51%



PIUTANG YANG NYATA - NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR ("Bank NTT")

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024, PMK Nomor 207/PMK.010/2015, PMK Nomor 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan & ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT") mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Total Hapus Buku / Write Off Tahun 2025

- a Hapus Buku Bulan Maret 2025 : Rp 3.794.004.452,46
- b Hapus Buku Bulan Juni 2025 : Rp 36.607.856.317,10
- c Total hapus Buku di tahun 2025 : Rp 40.401.860.769,56

2. Saldo Hapus Buku Tahun 2025 : Rp 419.087.921.839,83

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025.

Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata–Nyata Tidak Dapat Ditagih:

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di **Bank NTT**, agar masing–masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. **Bank NTT** senantiasa memenuhi Undang–Undang Perpajakan dan Undang–Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank NTT** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank NTT** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini.
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank NTT** di tahun pajak 2025 dan 2026. Demi keadilan, apabila piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan dan/atau menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan.
4. **Bank NTT** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, & penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan.
5. Piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank NTT**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku/Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi **Bank NTT**, maka masing–masing pihak wajib mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang–Undang beserta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SYARIAH NASIONAL

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan ini PT Bank Syariah Nasional mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut:

Tahun 2025
Rp 29.891.624.401,-

(Dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus satu rupiah)

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, bersama dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2025 sebagai lampiran.

Sosialisasi Aksi Korporasi Perbankan: KUHP/ KUHP Baru dan UU Penyesuaian Pidana

PERBANAS menyelenggarakan "Sosialisasi Aksi Korporasi Perbankan: KUHP/KUHAP Baru dan UU Penyesuaian Pidana" yang digelar pada 3 Februari 2026 di Jakarta. Narasumber dalam kesempatan tersebut adalah Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung Republik Indonesia



KOMITE MASYARAKAT PERBANKAN PEDULI (KMPP) PERBANAS

Berbagi Berkah di bulan Ramadhan 2026



Salah satu program kerja KMPP PERBANAS adalah Berbagi Berkah dan Bazar Murah sebanyak 10.000 paket sembako. Bazar Murah pertama kali dilaksanakan di Kampus PERBANAS Institute Jakarta pada 5 Maret 2026 yang dibuka secara resmi oleh Ibu Vera Eve Lim selaku Ketua Pengawas KMPP PERBANAS didampingi Rektor PERBANAS Institute, Prof. Dr. Hermanto Siregar, MSc., Ibu Aviliani selaku BPH Yayasan Pendidikan PERBANAS, Bapak Dio Alexander selaku Wakil Bendahara PERBANAS, Ibu Chistina Harapan selaku Pengawas KMPP PERBANAS, Bapak Indrastowo mewakili Tim Artha Graha Peduli, kemudian perwakilan dari BCA, dan Bank Jago dengan target 1.000 paket.

Setelah itu Bazar Sembako Murah dan Berbagi Berkah dilanjutkan berturut-turut selama bulan Ramadhan di Kampus PERBANAS Institute Bekasi, Tamiang Aceh, Padang, Purbalingga, Tegal, Cisarua-Bandung.



Berbagi Berkah di bulan Ramadhan

Tamiang-Aceh - 13 Maret 2026



Kota Padang dan Kab. Agam - 14 Maret 2026



Serang, Pubalingga dan Tegal- 15 Maret 2026



Cisarua-Bandung - 17 Maret 2026



Sosialisasi “PMK No. 108 Tahun 2025 dan Klinik Tindak Lanjut Coretax

PERBANAS pada 6 Maret 2026 menyelenggarakan Sosialisasi “PMK No. 108 Tahun 2025 dan Klinik Tindak Lanjut Coretax”. Narasumber dalam acara tersebut adalah Tim dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.



PT BANK ANZ INDONESIA Daftar Debitur Piutang Tak Tertagih Tahun 2026



Nama Debitur	Jumlah Rp.
PT BORNEO MINING SERVICES	13.760.586.821
PT ASMIN KOALINDO TUHUP	102.816.958.178
Total	116.577.544.999
Total piutang tak tertagih yang berjumlah di atas Rp 5 juta	116.577.544.999
Total piutang tak tertagih yang jumlahnya tidak melebihi Rp 5 juta	-
Total keseluruhan piutang tak tertagih	116.577.544.999

Keterangan:

- Publikasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021
- Rincian Piutang tak tertagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan
- Bagi Debitur yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, agar segera mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

CFO FORUM PERBANAS

Driving Acceleration with Accountability

CFO FORUM PERBANAS, 6 Maret 2026. "Driving Acceleration with Accountability" Ada dua topik yang dibahas dalam kesempatan tersebut "e-Economy Southeast Asia (SEA) 2025: Accelerating the Future in ASEAN" yang disampaikan oleh Mr. Aadarsh Bajjat & Venny Gunawan dari BAIN & Company dan topik "Update PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang disampaikan oleh Bapak Indra Wijaya, Ketua DSAK IAI. Hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan keynote speech adalah Bapak Deden Firman Hendarsyah selaku Deputy Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK mewakili Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.





Pendaftaran Mahasiswa Baru **PROGRAM** **PASCASARJANA** *Periode Maret 2026*

- Magister Akuntansi • Magister Manajemen
- Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)

Info lebih lanjut:

- ☎ +62 851 7985 3803 (Kampus Jakarta)
- ☎ +62 851 7985 3806 (Kampus Bekasi)

PENDAFTARAN:



admisi.perbanas.id



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL



www.perbanas.org



Perhimpunan Bank Nasional



[perbanas_official](https://www.instagram.com/perbanas_official)